

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
2023

PERBUP KAB.KUTAI KARTANEGARA NO 44, BD NOMOR 44, SETDA : 22 HLM  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;pasal 15 peraturan daerah no 9 tahun 2016; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;undang undang no 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja;Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 Tentang perangkat Daerah tahun 2016 nomor 144;peraturan dalam negeri no 5 tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah;peraturan dalam negeri no 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur;;Peraturan Menteri nomor 7 tahun 2022;peraturan menteri no 7 tahun 2022;peraturan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017;tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan ; susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan perencanaan pembangunan daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara,Badan Perencanaan Daerah yangb selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Peerencanaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;sistem kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;mekanisme kerja adalah proses dan kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu pegawai Aparatur Sipil Negara yang di lakukan dalam suatau sistem dengan mengedepankan kompetensi keahlian dan/atau ketrampilan;Laporan kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LKJIP adalah iktiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja;BAPPEDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;BAPPEDA mempunyai tugas sebagai unsur penunjang urusan pemerintah dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;ketentuan mengenai pembentukan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja uptd pada BAPPEDA diatur dengan peraturan Bupati;
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 11 Oktober 2023;
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada BPKAD (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;